

HAK POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN PERANNYA DALAM ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Satria Muchayar, Effendi Hasan

(satriafrisip@gmail.com, effendihasan@unsyiah.ac.id)

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Peran serta perempuan dalam politik di parlemen sebenarnya cukup menunjang. Keberadaan perempuan di sektor politik tidak hanya dipandang sebagai kaum subordinat (pelengkap) melainkan kaum yang layak dan patut menjadi politisi sejati. Pemahaman yang ada di masyarakat tentang perempuan di parlemen dirasakan dan dilatarbelakangi oleh kultur masyarakat yang lebih kental terhadap sifat patriarkat, yaitu struktur kekuasaan dan kekuatan laki-laki, dimana semua hubungan dipahami dalam superioritas dan inferioritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan Aceh dalam politik dan pemerintah bukanlah suatu hal yang baru, melainkan jauh sebelum peraturan-peraturan tentang keikutsertaan perempuan dalam dunia perpolitikan diciptakan, perempuan Aceh sudah memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam segala urusan. Selain dalam bidang pemerintahan, perempuan Aceh juga diikutsertakan dalam lembaga lainnya. Disamping itu, keterlibatan perempuan dalam politik serta kehebatan perempuan Aceh dalam menjalankan misi politik juga tercermin melalui peran perempuan dalam politik masa kini. Kerangka politik demokrasi di Indonesia telah berubah dan upaya pembaharuan sistem keterwakilan tengah berlangsung.

Sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, diharuskan menyesuaikan diri dengan berbagai prasyarat baru dalam tata demokrasi. Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya di Aceh harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah perempuan mempunyai hak politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh setara dengan apa yang diperoleh oleh anggota lainnya. Tidak ada perbedaan khusus dalam mengambil kebijakan dalam Alat Kelengkapan Dewan tersebut melainkan bagaimana menyikapi setiap persoalan di parlemen Aceh sehingga perempuan tidak dikatakan kaum subordinat.

Kata Kunci: Hak, Politik, Perempuan, DPR, AKD.

ABSTRACT

The woman election in Aceh is motivated by the strong patriarchal culture within Acehnese society itself, including in traditional political institutions. The courage of women in Aceh to get out of domestic affairs, especially being a member of parliament is a leap that needs to be studied. It should be admitted, that women's recruitment in political parties is generally not equal to men's activities, both in terms of quantity and quality. However, the purpose of this research was to find out the representation of women in the Aceh People's Representative Council in the Alat Kelengkapan Dewan as well as the challenges faced by women council members in their role towards the Alat Kelengkapan Dewan. This research uses qualitative method with descriptive approach, the collecting data obtained by two ways, primary data and secondary data. The primary data is a data obtained from the field through direct interviews with informants while the secondary data obtained from literature research by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. The results of this research show that the involvement of Acehnese women in politics and government is not a new thing, but long before the rules on women's participation in politics were created, Acehnese women have earned equal status with men in all matters. In addition to the governance, Acehnese women are also included in other institutions. In addition, the women's involvement in politics and the greatness of

Hak Politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan 2
Perannya dalam Alat Kelengkapan Dewan
(Satria Muchayar, Effendi Hasan)

Acehnese women in carrying out their political missions is also reflected through the role of women in contemporary politics. The political framework of democracy in Indonesia has changed and reform efforts in the system of representation are under way. As an institution, House of Representatives is necessary to adapt to the new prerequisites in the democracy. The efforts to strengthen women's political participation in Indonesia, particularly in Aceh should be placed within the context of the transition that the Indonesian nation is undergoing to a more democratic political system. The conclusion in this research is woman has an equivalent political rights in Aceh House of Representatives to what obtained by other member as well. There is no specific difference in taking the policy in the Alat Kelengkapan Dewan but how to behave toward each issue in the Aceh parliament so women are not said to be subordinates.

Key Words: *Women's, Political, Rights, Aceh, House of Representatives, AKD.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk partisipasi perempuan yang menarik untuk diamati ialah partisipasi perempuan di wilayah politik, yang tercermin dari partisipasi perempuan di parlemen. Partisipasi perempuan di parlemen sangat penting sebab parlemen merupakan salah satu suprastruktur politik yang berperan penting dalam berbagai kebijakan publik. Parlemen adalah kata lain dari lembaga legislatif yang memiliki tugas utama untuk melakukan legislasi atau proses pembuatan peraturan-peraturan peundang-undangan, disamping tugas lainnya seperti pengawasan dan anggaran. Partisipasi perempuan di parlemen yang diindikasikan melalui keanggotaannya di lembaga ini akan sangat signifikan, sekaligus membuka kesempatan kepada perempuan untuk merumuskan berbagai kebijakan publik. Semakin berkembang keterlibatan perempuan dalam masyarakat Indonesia walaupun secara proporsional jumlahnya belum seimbang dengan jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan, hak politik perempuan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Perempuan dan laki memiliki hak dan kewajiban

Hak Politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan 3
Perannya dalam Alat Kelengkapan Dewan
(Satria Muchayar, Effendi Hasan)

yang sama dalam politik. Namun begitu, hambatan yang timbul diantaranya karena faktor budaya, menyebabkan representasi politik perempuan di Parlemen masih sangat rendah. Sebagai upaya mengejar ketertinggalan tersebut, disahkanlah Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 yang memberikan quota minimal 30 persen bagi perempuan di parlemen.

Saat ini negara relatif mengakomodasi wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum), namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penetapan kuota 30 persen melalui akomodasi negara sudah diuji coba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif. Catatan representasi politik perempuan menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif.

Jauh sebelum itu jika kita melihat Aceh pada masa Konflik Gerakan Aceh Merdeka. Para perempuan tidak memiliki ruang gerak yang bebas dalam menentukan sikap politiknya seperti yang dijamin oleh Negara. Para perempuan Aceh sangat terindimidasi dengan keadaan Aceh pada masa itu, sehingga ruang gerak para perempuan Aceh untuk berkiprah dalam dunia politik sangatlah kecil harapannya, banyaknya intimidasi terhadap para kaum perempuan saat itu yang membuat para perempuan Aceh merasakan sikap traumatis yang mendalam untuk bersikap lebih dalam hal berpolitik seperti yang dijamin oleh Negara.

Dengan hadirnya undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam hal berpolitik diharapkan mampu membawa arus yang baik bagi perempuan di Aceh, ada sebuah harapan yang baik bagi perempuan Aceh pasca terjadinya konflik yang berkepanjangan, akan tetapi perwakilan mereka belumlah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Seperti hal menjamin tentang perlindungan perempuan dan anak, pendidikan politik bagi

perempuan di Aceh, dikarenakan minimnya para politisi perempuan yang duduk dalam perlemen di Aceh.

Pemilihan perempuan di Aceh dilatar belakangi kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Provinsi Aceh itu sendiri, termasuk dalam institusi politik tradisional. Ada lagi fatwa-fatwa ulama yang melarang adanya perempuan aceh untuk bergabung dalam dunia politik. Keberanian perempuan di Aceh untuk keluar dari urusan personalnya, terlebih menjadi anggota parlemen merupakan lompatan yang perlu dikaji. Namun harus diakui bahwa pada umumnya rekrutmen perempuan di partai politik belum setara dengan aktivitas laki-laki, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Apakah karena kurangnya kesiapan perempuan terlibat di dalam politik ataukah perempuan sendiri kurang berminat sebagai politisi ataukah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan.

Tentunya, dalam upaya memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%, maka partai politik harus melakukan upaya rekrutmen calon legislatif yang mumpuni di bidangnya. Proses ini dilalui melalui rekrutmen politik dan sosialisasi politik, dimana merupakan salah satu bagian dari sosialisasi politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan dasar. Adapun teori yang digunakan adalah Gender, Teori Keterwakilan, dan Budaya patriakhi.

1. Teori Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian

peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. (Herien Puspitawati, 2013: 1).

2. Teori Keterwakilan

Sejarah perwakilan telah mulai di perbincangkan dalam kehidupan non-politik sejak Yunani kuno, namun pembahasan dalam bentuk konsep telah dimulai pada awal abad ke 14. Thomas Hobbes pada tahun 1651 menerbitkan *Leviathan* untuk membahas masalah perwakilan politik secara filosofis dan pada abad ke 18 studi yang berpengaruh sampai dewasa ini diantaranya antara lain karena teori kemandirian wakil yang di kemukakan oleh Edmund Burke tahun 1779. Karya Burke (dimana wakil bebas bertindak dan menentukan sikapnya terhadap wakil) dianggap sebagai permulaan studi klasik terhadap perwakilan politik, disusul oleh sejumlah peneliti mulai dari John Stuart Mill (1861) sampai dengan Karl Loewenstein (1922). Studi yang lebih mendalam dilakukan oleh Alfred de Grazia (1968) dan Pitkin (1957) sudah lebih mendalam tentang perwakilan politik. (Sanit, 1985).

3. Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang mengakar dan sistem politik yang didominasi oleh laki-laki memiliki dampak negatif yang besar bagi upaya perempuan untuk mendapatkan hak dalam partisipasi politiknya. Hubungan patriarki tidak hanya terjadi dalam lingkup kekerabatan saja, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan

keagamaan, bahkan seksualitas. Akibatnya, kaum perempuan selalu berada di bawah kuasa kaum laki-laki dalam pembuatan keputusan publik. Di bidang pendidikan misalnya, perempuan telah mengalami peningkatan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Posisi-posisi penting baik di pemerintahan maupun non pemerintahan cukup banyak dijalankan oleh perempuan. Dalam bidang politik, yang seringkali disebut sebagai dunia laki-laki, aspirasi perempuan juga telah mendapat tempat walaupun belum semua aspek terwakili. Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia telah muncul sejak lama. Begitu banyak tercatat sejumlah tokoh perempuan yang turut memberikan andil dalam aktivitas politik, dengan perjuangan fisik melawan penjajah, serta berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan (Bakti, 2012:149).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Taylor dan Bogdan (Bagong dan Sutinah, 2013: 166) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hj. Ummi Kalsum : Anggota Perempuan DPR Aceh
2. Drs. Hj. Mariati MR : Anggota Perempuan DPR Aceh
3. Hj. Siti Nahziah : Anggota Perempuan DPR Aceh
4. Hj. Nurlelawati : Anggota Perempuan DPR Aceh
5. Hj. Fauziah H.M. Daud : Anggota Perempuan DPR Aceh
6. Drh. Nuraini Maida : Anggota Perempuan DPR Aceh
7. Hj. Yusniar : Anggota Perempuan DPR Aceh
8. Hj. Fatimah : Anggota Perempuan DPR Aceh
9. Hj. Liswani : Anggota Perempuan DPR Aceh
10. Hj. Ismaniar : Anggota Perempuan DPR Aceh
11. Kartini Ibrahim : Anggota Perempuan DPR Aceh
12. Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I : Ketua DPR Aceh
13. Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si : Wakil Ketua I DPR Aceh
14. Teuku Irwan Djohan, ST : Wakil Ketua II DPR Aceh
15. Dalimi, SE. Ak : Wakil Ketua III DPR Aceh

Lainnya, peneliti akan mewawancarai tokoh perempuan, pengamat politik dan hukum serta akademisi yang konsen terhadap berbagai isu di Aceh, tidak terkecuali dengan isu-isu perempuan, yaitu:

1. Raihal Fajri (Direktur Katahati Institute)
2. Muksalmina MTA, SH (Pengamat Politik dan Hukum)
3. Fajran Zain (Dosen Fisip Unsyiah)
4. Badri Hasan, MH (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry)

Selain itu, dari unsur kepartaian juga penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan perekrutan kader partai perempuan dalam kancah perpolitikan di Aceh, diantaranya:

1. Partai Golkar
2. Partai Demokrat
3. Partai Amanat Nasional, dan
4. Partai Aceh.

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Uraian lebih lanjut kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Perannya dalam Alat Kelengkapan Dewan

A. Tantangan yang dihadapi Anggota Dewan Perempuan.

Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis, maupun hukum. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk oleh Indonesia, menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin. Namun, dalam tataran realitas masih mengalami banyak tantangan dan hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Sebagai contoh, penetapan kuota 30% bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif belum signifikan atau masih jauh di bawah target.

Kendalanya adalah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kurang aktif dan kurang berani dalam mengambil keputusan, walaupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang laki-laki tidak mempermasalahkan keberadaan kaum perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karena hal ini sudah diamankan undang-undang melalui

kebijakan *affirmatif action*. Namun, kesan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjadikan mereka termaginalkan dengan sendirinya sehingga sangat berpengaruh pada struktural-struktural dewan, seperti pada komisi-komisi, fraksi-fraksi, Badan Anggaran, Badan legislati dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

Persoalan perempuan bukan persoalan yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan publik. Di antara agenda utama yang harus diperjuangkan untuk perbaikan kondisi masyarakat serta peningkatan posisi perempuan adalah masih sama seperti isu pada pemilu tahun 2004, 2009 dan tahun 2014, yaitu di seputar pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan penghentian kekerasan terhadap perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa persoalan, diantaranya:

1. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menempati pada posisi yang baik tanpa adanya perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. hal ini tentunya menjadi sebuah upaya bagi perempuan untuk terus berusaha pada batas maksimum keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen di parlemen. Artinya, jangan dijadikan perempuan sebagai kaum subordinat dewan dalam pengambilan keputusan publik.
2. Tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan dalam perannya terhadap Alat Kelengkapan Dewan diantaranya dikarenakan dengan budaya patriarki yang sudah terkontaminasi dengan masyarakat serta adanya pemahaman terhadap tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Ini menjadi kendala bagi anggota parlemen khususnya perempuan untuk berkiprah lebih

jauh untuk bisa menduduki posisi-posisi yang mampu mewujudkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas. 2006. *Idealisme Perempuan Indonesia dan Amerika 1920-1940*. Makassar: Eramedia.
- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Burhan Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhan Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hafied H. Cangara. 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah, dkk. 2013. *Paradoks Representasi Politik Perempuan: Studi Terhadap Perempuan Anggota DPRD Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat*. Jakarta: Puslapol FISIP UI.
- Ichsanul Amal. 1998. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya.
- Ikhwan Fauzi, 2002. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Khofifah Indar Parawansa. 2002. *Mengukir paradigma menembus tradisi: pemikiran tentang keserasian jender*, Jakarta: LP3ES.

- Muhammad Ali Syafa'at. 2011. *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*, Bandung: Pustaka Cendekia Utama.
- Muhammad Nuruzzaman. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Miriam Budiardjo. 2008. *dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nur Iman Subono. 2003. *Taktik Negara Menguasai Rakyat*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu Surtiati Hidayat. 2000. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2009. *Pendidikan di Aceh Dari Masa ke Masa*, Banda Aceh: Badan Arsip dan perpustakaan Provinsi Aceh.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siti R. Zuhro, dkk., 2009. *Demokrasi Lokal (Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)*.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Intan Quratul Aini, dkk, 2007. *Dinamika Peran Perempuan Aceh Dalam Lintas*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.

B. Jurnal

Linda Dwi Eriyanti. 2016. Pemikiran Politik Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perspektif Feminisme: Penelusuran Pemikiran Mainstream dan Non-Mainstream. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 20, Nomor 1, Juli 2016.

Moh. Maiwan. 2006. Perempuan dalam Teori Politik Plato: Persamaan, Ironi dan Kontradiksi The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1 No. 2, July 2015. Jurnal The Politics (dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan). Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Darwin, Effendi. 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2: 211-228. Maret 2018. Kepemimpinan Geuchik Dalam Meningkatkan Pembangunan Gampong Alue Krueng Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. (Studi kepemimpinan geuchik Miswar dalam pengelolaan dana gampong)

Zulfikar, Effendi. 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 3, Nomor 2: 1-20 Maret 2018. Politik Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Penyebab Keterlambatan Pengesahan APBA Tahun 2016)

C. Internet

Adinda Tenriangke Muchtar. 2008. Mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik. *Media Indonesia*. Rabu, 3 September 2009.

DPRA. 2014. Alat Kelengkapan DPRA 2014. Diakses di internet pada tanggal 9 Maret 2018 dari situs: <https://dpra.acehprov.go.id>

Herien Puspitawati. 2013. Konsep, Teori Dan Analisis Gender. Diakses di internet pada tanggal 9 Maret 2018 dari situs: <http://ikk.fema.ipb.ac.id>

Kelompok Kerja Gender. 2007. Evaluasi Situasi Perempuan Perempuantahun 2006 Tahun 2006 Tahun 2006 Di Aceh. Diakses di internet pada tanggal 9 Maret 2018 dari situs:
<http://www.conflictrecovery.org>

Kartini Eriani. 2011. Pendidikan Politik Penting Bagi Perempuan.
<http://www.Waspada.co.id>.

Kompas, 30/11/2006, "Gagalnya Perempuan Aceh dalam Pilkada).
<https://nasional.kompas.com>

UNDP. 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Politik dan Pemerintahan. Diakses di internet pada tanggal 9 Maret 2018 dari situs:
<http://www.batukarinfo.com>